



**ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAN PERANANNYA
TERHADAP PDRB (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Oleh:
Adelia Herdaleny
NIM 110810101014

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**Analisis Kapasitas Fiskal dan Peranannya Terhadap PDRB
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Adelia Herdaleny
NIM 1108101014

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan piji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sutingah dan Ayahanda Heriyanto tercinta, yang memberi kasih sayang, doa dan pengorbanan selama ini;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Adikku tersayang Reizkia Tegar Rahmadani yang selalu aku banggakan;
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

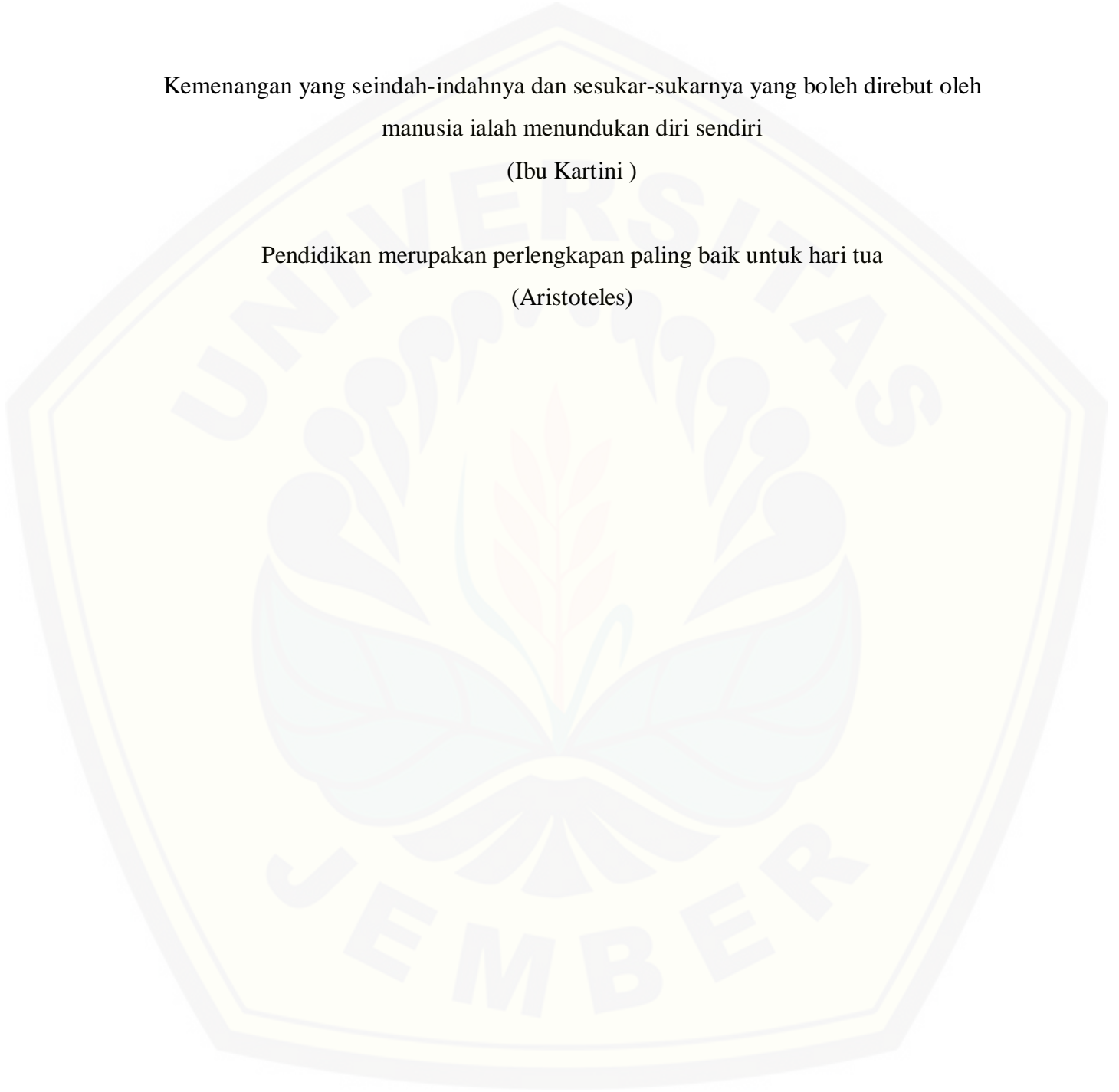
MOTTO

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri

(Ibu Kartini)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Herdaleny

NIM : 110810101014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : ” Analisis Kapasitas Fiskal dan Peranannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2015

Yang menyatakan,

Adelia Herdaleny

110810101014

SKRIPSI

**ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAN PERANANNYA
TERHADAP PDRB (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR)**

Oleh:

Adelia Herdaleny

110810101014

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Badjuri M.E.

Dosen Pembimbing Pendamping : Fajar Wahyu P, S.E., M.E.

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kapasitas Fiskal dan Peranannya Terhadap
Pendapatan Regional (Studi Kasus Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur)

Nama Mahasiswa : Adelia Herdaleny

NIM : 110810101087

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 23 Agustus 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Badjuri M.E.
NIP. 19680926199403 2 002

Fajar Wahyu P, S.E., M.E.
NIP. 198103302005011 003

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAN PERANANNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Adelia Herdaleny
NIM : 110810101014
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Teguh Hadi Priyono S.E., M.Si. (.....)
NIP. 19700206199403 1 00 2
2. Sekretaris : Fivien Muslihatinningsih S.E., M.Si. (.....)
NIP. 19830116200812 2 00 1
3. Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santoso S.E., M.Si. (.....)
NIP. 19680715199303 1 00 1

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si
NIP. 19630614199002 1 001

*Analisis Kapasitas Fiskal dan Peranannya Terhadap PDRB
(Studi Kasus Kabupaten/kota di Jawa Timur)*

Adelia Herdaleny

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Dengan berubahnya sistem pemerintahan yang ada, dimana pemerintah daerah dapat mengatur dan mengalokasikan secara mandiri penerimaan daerah. Kebijakan fiskal difungsikan untuk meningkatkan pendapatan regional dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga memacu peningkatan output maupun aktivitas perekonomian. Selama 4 tahun pelaksanaan kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Timur yaitu periode tahun 2010-2013 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur meningkat tiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar tingkat kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur dan bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan regional di Jawa Timur Tahun 2010-2013. Jenis data penelitian ini adalah data panel (*Panel Least Square*) dengan menggunakan data sekunder berdasarkan urutan waktu (*time series*) dan berdasarkan urutan observasi (*cross section*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pendekatan *fixed effect*.

Dari hasil penelitian diketahui tingkat kapasitas fiskal kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur relatif tinggi, di mana tingkat kemampuan pengelolaan keuangan daerah sudah cukup baik. Begitu juga dengan adanya pengaruh yang positif antara pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pendapatan regional.

Kata Kunci : Kapasitas Fiskal, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Regional.

*Analysis fiscal capacity and roles against PDRB
(a case study district / cities in east java)*

AdeliaHerdaleny

*Of economics and study development ,the faculty of economics ,
Jember University*

With the change of administration system, Where local government can arrange and allocating independently regional income. Fiscal policy functioned to increase revenue regional and develop the existing potential , so that spur increasing output and economic activities. 4 years for the fiscal policy in east java namely the period 2010-2013 note that economic growth of 35 / city district in east java increased every year.

This research aims to know how big the level of fiscal capacity of districts in east java and how the influence of fiscal policy against revenue regional in east java 2010-2013 year. The kind of data research is the panel (panel least square) using data secondary based on a time (time series) and based on a observation (cross section) .Methods used in research is (ols ordinary least square) by approach fixed effect.

The research known the capacity level of fiscal / district city in east java relatively high , where rate ability regional financial management is enough .So are the positive influence between government spending and investment against PDRB

Keyword : fiscal capacity , fiscal policy , regional income

RINGKASAN

Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Peranannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur ; Adelia Herdaleny, 110810101014; 2015: 76 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal maka peran pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola APBD yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah. Kapasitas fiskal adalah salah satu implementasi dari terjadinya desentralisasi fiskal dalam hal ini dari segi potensi daerah (kapasitas fiskal. Dengan adanya potensi daerah diperlukan kebijakan yang benar-benar mampu dalam mengelola potensi tersebut.

Hal ini menciptakan pertumbuhan sekaligus pendapatan pemerintah semakin tinggi yang seharusnya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Kenyataannya Jawa Timur masih terhitung tinggi dengan tingkat pendapatan dan potensi investasi yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kapasitas fiskal di Jawa Timur dan bagaimana peran kebijakan fiskal pemerintah di kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data panel tahun 2010-2013 pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil studi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan regional di Jawa Timur. Hasil pemetaan terhadap tingkat kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur terbagi menjadi 4 golongan yaitu a) Kapasitas fiskal sangat tinggi, b) Kapasitas fiskal tinggi, c) Kapasitas fiskal sedang dan d) kapasitas fiskal rendah.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Investasi Publik dan Swasta terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.Badjuri M.E. dan Bapak Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Sebastiana V, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Ilmu Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan;
3. Bapak Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Sebastiana V, M.Kes, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya Jurusan IESP yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;
6. Orang tua terbaik, Ibunda Sutingah dan Ayahanda Heriyanto yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasehat dan kerja keras yang tidak pernah putus untuk penulis;

7. Adikku Reizkia Tegar Rahmadani, yang telah memberikan dukungan dan semangat;
8. Keluarga besar di Tulungagung dan Sidoarjo atas doa, bantuan, dukungan, motivasi yang selalu diberikan;
9. Teman-teman Konsentrasi Regional angkatan 2011, Royan, Putra, Lucky, Fira, Amel, Candra, Bunga yang telah memberikan segala bantuan, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis;
10. Penghuni Jl.Jawa 4a No.17 Jember, yang selalu membantu menghilangkan penat saat penulisan skripsi ini. Terimakasih atas hari-hari yang menyenangkan;
11. Semua sahabat di Sahabat Pena;
12. Semua sahabat di PMII Rayon Ekonomi;
13. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi bidang Ekonomi terutama pada bagian Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Jember, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Desentralisasi Fiskal.....	7
2.1.2 Kapasitas Fiskal.....	8

2.1.3 Kebijakan Fiskal	12
2.1.4 Pendapatan Regional	13
2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi... ..	14
2.1.6 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Pendapatan Regional.....	20
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Konseptual	23
2.4 Hipotesis Penelitian	25
BAB 3. METODE PENELITIAN	26
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.1.1 Jenis Penelitian	26
3.1.2 Unit Analisis	26
3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Analisis Data	27
3.3.1 Tingkat Kapasitas Fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur	27
3.3.2 Regresi Data Panel Variabel Kebijakan Fiskal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur	28
3.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	29
3.3.4 Prosedur Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	30
3.3.5 Uji Statistik	31
3.3.6 Uji Asumsi Klasik	32
3.4 Definisi Variabel Operasional	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum	36
4.1.1 Kondisi Geografis Wilayah di Jawa Timur	36
4.1.2 Keadaan Demografis Wilayah di Jawa Timur	38
4.1.3 Kondisi Makro Ekonomi Jawa Timur	38

4.1.4 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur.....	39
4.2 Hasil Penelitian	42
4.2.1 Tingkat Kapasitas Fiskal tiap kabupaten/kota di Jawa Timur.....	42
4.2.2 Pengaruh variabel Kebijakan Fiskal terhadap Pendapatan Regional.....	45
4.2.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	46
4.2.4 Hasil Uji Statistik	48
4.2.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	49
4.3 Pembahasan	52
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa	3
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
3.1 Nilai Durbin Watson dalam Eviews.....	32
4.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013.....	39
4.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013.....	41
4.3 Hasil Regresi Fixed Effect Model Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Investasi (X2) terhadap Pendapatan Regional	45
4.4 Hasil Uji Chow untuk menentukan model common effect dan fixed effect.....	47
4.5 Hasil Uji Hausman untuk menentukan model fixed effect dan random effect	47
4.6 Nilai t-hitung Variabel Kemampuan Pemerintah dan Penduduk Miskin	48
4.7 Uji Multikolinieritas pada Data Penelitian.....	50
4.8 Hasil Regresi Uji Glejser.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Perbandingan Kemiskinan Antara Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.....	4
2.1 Fungsi Produksi Neo Klasik.....	15
2.2 Kerangka Konseptual.....	23
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur	36
4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Metode Jarque Bera.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Data PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai, Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2013	57
B. Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i> (FEM)	66
C. Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	67
D. Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> (REM)	68
E. Hasil Uji Chow (<i>Chow Test</i>)	69
F. Hasil Uji Housman (<i>Housman Test</i>)	70
G. Hasil Uji Normalitas (<i>Jarque Bera Test</i>)	71
H. Hasil Uji Multikolinearitas (<i>Cooficient Matrix Variable</i>)	72
I. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)	73

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2000 Indonesia melakukan perubahan dalam sistem pemerintahannya, terutama dalam hal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan mengolah sumber daya yang ada sehingga pembangunan lebih sesuai dengan potensi dan prioritas daerahnya demi terciptanya tujuan otonomi daerah oleh pemerintah (Wijaya, 2005).

Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999. Praktek desentralisasi fiskal dijalankan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “*money follows functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik yang di daerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Kuncoro, 2007).

Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi kedua undang-undang tersebut menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 (sebagai revisi UU Nomor 22 Tahun 1999) tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 (sebagai revisi UU Nomor 25 Tahun 1999) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Suparmoko (2002), untuk meningkatkan pendapatan daerah dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan yang terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan

pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat dan juga dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkelanjutan.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada dasarnya semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sebaliknya semakin kecil kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan bahwa semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Satu hal yang perlu diingat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus mencari dan membuat pajak baru, tetapi lebih upaya memanfaatkan penerimaan pajak daerah secara optimal dan mengurangi kebocoran penerimaan pajak daerah. Dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan lebih tergali. Selain itu, setiap wilayah juga diberikan dalam bentuk “*Block Grant*” berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah pusat mendistribusikan DAU berdasarkan formula pemerataan yang mengukur kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal dari setiap daerah. Dengan demikian diharapkan proses

pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi (Adi, 2007).

Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah (Fajrin, 2009). Kebijakan Fiskal adalah instrumen penting peranannya dalam sistem perekonomian yang berguna untuk mendorong pendapatan regional.

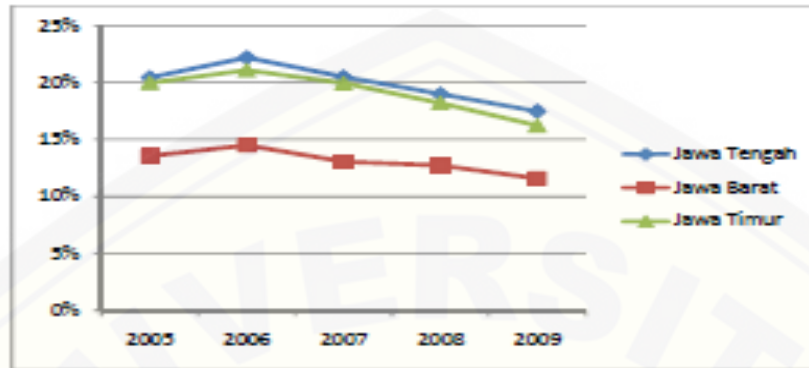
Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa

Propinsi	2007	2008	2009	Rata-rata
DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02	5,89
Banten	6,04	5,77	4,71	5,50
Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14	5,44
Jawa Barat	6,48	6,21	4,19	5,62
Jawa Timur	6,11	5,94	5,01	5,68
DI. Yogyakarta	4,31	5,03	4,43	4,59

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010.

Laju pendapatan regional di Jawa Timur berdasarkan Tabel 1.1 selama periode 2006-2010 memiliki tingkat yang cukup signifikan. Walaupun dalam rata-rata pendapatan regional Propinsi DKI Jakarta masih tertinggi. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola Sumber Daya Alam yang dimilikinya. Kinerja ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB dalam nilai riil karena menunjukkan pertumbuhan output sebenarnya (Joko Tri, 2006: 12).

Propinsi Jawa Timur bagaikan magnet ekonomi di pulau Jawa bagian Timur menduduki peringkat ke-2 rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah DKI Jakarta disusul kemudian oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, kemudian di posisi terakhir adalah DI. Yogyakarta.



Sumber : BPS, 2005-2009.

Gambar 1.1 Perbandingan kemiskinan antara Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jika dilihat dari grafik di atas, maka tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Timur meningkat di tahun 2006 dan mulai menurun di tahun 2007. Dengan tingkat PDRB yang tinggi tetapi jumlah kemiskinan tiap tahun yang dimiliki oleh Propinsi Jawa Timur juga semakin tinggi.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, semakin besar pula anggaran yang mampu dialokasikan oleh suatu daerah untuk membangun daerah tersebut.

Kebijaksanaan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah dilakukan dengan transfer dana dari pemerintah Pusat kepada Daerah melalui konsep Fiscal Gap yaitu kebutuhan Daerah (kebutuhan fiskal) dibandingkan dengan potensi Daerah (kapasitas fiskal). Kebutuhan daerah yang melebihi kapasitas fiskal akan ditutup dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Umum yang disalurkan kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan secara menyeluruh dan berkesinambungan, salah satu penopang yang digunakan pemerintah yang

dibutuhkan demi mengembangkan perekonomian daerahnya adalah dengan adanya tambahan investasi (Jhinghan, 2004).

Sukses tidaknya suatu daerah menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kompetitif tidak terlepas dari berbagai faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan investasi mempengaruhi jumlah konsumsi dan pendapatan pemerintah maupun masyarakat. Pada akhirnya, investasi dan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah saling mempengaruhi dalam hal pertumbuhan dan pendapatan dalam suatu wilayah agar lebih berkembang. Investasi memberikan angin segar bagi pemerintah dan masyarakat karna dengan adanya investasi perputaran modal yang ada dalam suatu wilayah. (jhinghan, 2004)

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh variabel-variabel kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kapasitas fiskal keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisa pengaruh variabel-variabel kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabuapten/Kota di Propinsi Jawa Timur.

1.3 Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah, dapat tercipta manfaat seperti dibawah ini:

1. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.
2. Bagi pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi.
3. Bagi masyarakat, mahasiswa dan peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi menjadi bahan informasi, tambahan pengetahuan dan sumber rujukan bagi yang berminat di keuangan daerah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Definisi desentralisasi menurut UU No.32 tahun 2004 :

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk memperbaiki relevansi kualitas penyediaan pelayanan publik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dengan mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial baik regional maupun nasional. Secara garis besar ada tiga bentuk penerapan desentralisasi fiskal (Budi, 2006: 26-29) yaitu :

- a. Desentralisasi penuh, dimana pendelegasian tanggung jawab, wewenang dan fungsi kepada pemerintah daerah dilakukan secara penuh. Pemerintah daerah harus bertindak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat namun tetap memperoleh kebebasan dalam menentukan cara menjalankan tugas.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tetapi dalam kenyataannya masih banyak daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat. Disisi lain desentralisasi fiskal menimbulkan distorsi ekonomi pada beberapa daerah, sebab beberapa kebijakan yang pemerintah daerah lakukan dapat membebani para investor yang ingin menginvestasikan modalnya.

Kondisi ini diperparah dengan adanya pelimpahan wewenang membuat tingkat korupsi dana dari pusat semakin meningkat.

Meskipun kita juga tahu akan keuntungan dari desentralisasi fiskal tetapi jika tidak disertai dengan peningkatan keahlian aparatur pemerintah yang sesuai bidangnya dan tingkat akuntabilitas yang lebih baik maka sama saja dengan membuka peluang untuk menyebabkan bencana lokal seperti pelayanan publik yang buruk.

2.1.2 Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal menurut peraturan menteri keuangan No 33/PMK.07/2015 adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Tujuan dari kapasitas fiskal, yaitu: 1) Menganalisis pengaruh permintaan dan pengeluaran Negara bagi perbaikan kondisi perekonomian, penurunan tingkat pengangguran, dan kestabilan harga, 2) Pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi, 3) Pengembangan aspek sosial seperti pemerataan pendidikan dan kesehatan.

Pengertian PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber PAD terdiri dari:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah

Hasil Perusahaan milik Daerah, merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

d) Lain-lain yang sah

Penerimaan selain yang disebutkan di atas tetap sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut UU.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah. Fungsi dari penerimaan adalah untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang tersedia untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, dengan cara memperhatikan besarnya total penerimaan dalam satu tahun anggaran yang diterima pemerintah daerah (Wibowo, 2008).

PAD adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk

memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD, maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah .

Transfer yang Bersifat Umum terdiri dari kelompok-kelompok sebagai berikut ini :

- a) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi. Alokasi ini dapat digunakan secara leluasa oleh pemerintah daerah karena tidak terikat dalam kriteria tertentu (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 21),
- b) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil meliputi PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, PPh, Sumber Daya Alam (hutan, tambang, dan perikanan),
- c) Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya, serta untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Alokasi Dana Otonomi Khusus dihitung atas dasar persentase yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya,

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 164 ayat (1), lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu, seperti bencana alam yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu ditetapkan dengan peraturan presiden. Sementara itu, besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri dalam negeri dan menteri teknis terkait. Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawab penggunaan dana darurat diatur dalam peraturan pemerintah.

Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan(UU No.17 Tahun 2003). Pemerintah daerah dalam hal ini perlu memperhatikan batas kewajaran, kepatutan dan belanja pegawai dalam undang-undang dapat dihitung dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penduduk miskin yang merupakan indikator kedua dalam mengukur tingkat kapasitas fiskal adalah penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2010). Jadi, dapat diartikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Semakin banyak jumlah penduduk miskin yang ada akan semakin membebani *output* yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Pada akhirnya ketidakstabilan ekonomi akan terjadi dan ketimpangan yang ada di masyarakat semakin lebih tinggi.

2.1.3 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), yang terdiri dari pajak atau *Tax* (T) dan pengeluaran pemerintah atau *Government Expenditure* (G) (Murni, 2006).

Tax atau pajak (T) dalam analisis makro dipandang sebagai daya beli masyarakat berupa uang yang diserahkan kepada pemerintah. Government expenditure (G) merupakan pengeluaran pemerintah, tetapi atas pengeluaran tersebut akan memperoleh hasil secara langsung misalnya membayar gaji pegawai negeri (Murni, 2006)

Apabila pemerintah ingin menciptakan stabilitas harga, maka kebijakan fiskal yang dilakukan adalah bersifat kontraktif, yaitu dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Dengan demikian, maka permintaan agregat akan turun dan hal tersebut akan mengurangi kemungkinan terjadinya kenaikan harga-harga. Apabila pemerintah ingin meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, maka dapat melakukan kebijakan fiskal ekspansif dengan menaikkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Hal tersebut akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian (Sasana, 2009).

Jika pemerintah ingin menciptakan stabilitas harga, maka kebijakan fiskal diusahakan kontraktif. Hal itu ditandai dengan penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak. Dengan demikian permintaan agregat di dalam perekonomian akan turun dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya

kenaikan harga. Sebaliknya, jika pemerintah ingin meningkatkan tingkat lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, maka kebijakan fiskal yang di tempuh adalah bersifat ekspansif. Dimana pengeluaran pemerintah dinaikkan atau pajak diturunkan. Hal ini akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian sehingga terjadi ekspansi dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik, namun pada kenyataannya di beberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi di jalur yang tidak produktif dari masyarakat di negara tersebut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi.

2.1.4 Pendapatan Regional

Pendapatan Regional mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya ini disebut pertumbuhan ekonomi yang berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara. Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2004), proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Adam Smith

Menurut Smith pertumbuhan ekonomi mempunyai dua aspek utama, pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Dalam pertumbuhan output total terdapat unsur pokok dari sistem produksi dari suatu negara yaitu :

- Sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum. Jika sumberdaya belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi, pertumbuhan output akan berhenti jika sumberdaya alam telah digunakan sepenuhnya.
- Jumlah penduduk memiliki peranan yang pasif dalam pertumbuhan output. Artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
- Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan tingkat output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimum).

Faktor penunjang dibalik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output yang pertama adalah semakin luasnya pasar sehingga potensi pasar dapat dimaksimalkan, tetapi jika setiap masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan ekonominya. Kedua, tingkat keuntungan ini tergantung dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat

perumbuhan modal maka, tingkat keuntungan akan segera merosot (Arsyad, 2007) .

Jumlah penduduk akan meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah yang mencukupi kehidupan sehari-hari. Jika ini berlaku, orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya, jika upah yang berlaku lebih rendah maka jumlah penduduk akan menurun (Arsyad, 2007).

b. Teori Neo Klasik (Solow-Swan)

Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Rasio modal output (COR) bisa berubah, jika digunakan jumlah modal yang berbeda dengan bantuan tenaga kerja yang berbeda pula. Dengan adanya keluwesan ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja untuk memperoleh tingkat output yang diinginkan (Arsyad:2007).

Fungsi Solow-Swan bisa dituliskan dengan cara berikut:

$$Q_t = T_t^a K_t L_t^b \dots \dots \dots (2.1)$$

di mana:

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

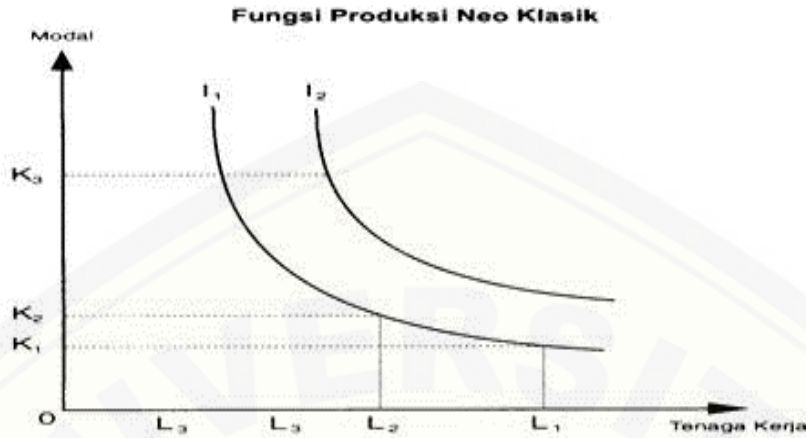
T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal.

b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja.



Gambar 2.1 Fungsi Produksi Neo Klasik
 Sumber : Arsyad (2007)

c. Teori Harrod dan Domar

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dikembangkan pada waktu yang bersamaan di Amerika Serikat. Meskipun keduanya menggunakan proses yang berbeda, tetapi hasil yang diharapkan sama, sehingga kedua ide tersebut di beri nama Harrod-Domar. Pertumbuhan ekonomi dalam teori ini adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mantap, dimana hal itu hanya tercapai jika :

$$g = k = n \dots \dots \dots (2.2)$$

Dimana :

- g = tingkat pertumbuhan output
- k = capital atau tingkat pertumbuhan modal
- n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto atau stok modal (capital stok). Karena asumsi yang dipakai adalah perekonomian dalam keadaan full employment dan barang modal yang digunakan yang ada di masyarakat digunakan secara penuh, berlangsung dalam dua perekonomian sektor, tabungan masyarakat proporsional dengan

besarnya pendapatan nasional dan kecenderungan menabung (Marginal Prosperity to Save) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal dan output (Incremental Capital Output Ratio). Dapat disusun sebuah model pertumbuhan ekonomi yang sederhana sebagai berikut :

1. Tabungan neto (S) adalah bagian tertentu s , dari pendapatan nasional (Y) sehingga didapatkan persamaan sederhana

$$S = sY \quad (2.3)$$

2. Investasi neto (I) diteapkan sebagai perubahan yang terjadi dalam persediaan modal (K), dan dapat diwakili dengan ΔK sehingga

$$I = \Delta K \quad (2.4)$$

Tetapi, karena total persediaan modal K , memiliki hubungan langsung dengan total pendapatan atau output nasional, Y , seperti yang diekpresikan dengan rasio modal output c^3 maka

$$\frac{K}{Y} = c \quad (2.5)$$

u

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = c \quad (2.6)$$

u akhirnya

$$\Delta K = c\Delta Y \quad (2.7)$$

3. Akhirnya, karena tabungan nasional neto (S), harus sama dengan investasi neto (I), dapat ditulis persamaan sebagai berikut

$$S = I \quad (2.8)$$

api, dari persamaan 2.2 diketahui bahwa $S = sY$, dan dari persamaan 2.3 dan 2.4 diketahui bahwa

$$i = \Delta K = c\Delta Y \quad (2.9)$$

ngan demikian, dapat ditulis identitas tabungan sama dengan investasi dalam persamaan 2.4 sebagai berikut:

$$S = sY = c\Delta Y = \Delta K = I \quad (2.10)$$

u untuk menyederhanakannya menjadi

$$sY = c\Delta Y \quad (2.11)$$

ngan membagi kedua sisi persamaan 2.6 pertama dengan Y dan kemudian dengan c , akan diperoleh:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{c} \quad (2.12)$$

Logikanya, agar bisa tumbuh dengan pesat setiap perekonomian haruslah menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin GNP-nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan maksimal yang dapat dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi juga amat tergantung pada tingkat produktivitas investasi tersebut (Thodaro, 2000).

d. Teori Keynes

Dalam teori ini yang berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya Great Depression (Jhinghan, 2004).

Menurut Keynes, terdapat dua pendekatan dalam analisis determinasi pendapatan nasional yaitu *Income approach* dan *Expenditure approach* (Murni, 2006). Dalam *income approach*, nilai pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat sangat ditentukan oleh besar konsumsi dan tabungan masyarakat secara agregat dan juga ditentukan oleh pajak. Secara matematis akan terlihat persamaan :

$$Y = C + S + Tx \quad (2.13)$$

Dimana Y : Pendapatan nasional

C : Konsumsi

S : Tabungan

Tx : Pajak

Sedangkan dalam expenditure approach, pendapatan nasional dapat ditentukan oleh besarnya pengeluaran agregat atau permintaan agregat, pengeluaran agregat atau permintaan masyarakat secara keseluruhan. Secara matematis akan terlihat persamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + (G + Tr) \quad (2.14)$$

Dimana
Y : Nilai Produk Nasional
C : Konsumsi
I : Investasi
G : *Government Expenditure*
Tr : *Government Transfer*

Kegiatan ekonomi dikatakan seimbang apabila nilai tabungan masyarakat ditambah pajak, sama dengan besar investasi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Secara sistematis kondisi tersebut dapat ditemukan sebagai berikut :

$$C + S + Tx = C + I + (G + Tr) \quad (2.15)$$

$$S + Tx = I + (G + Tr) \quad (2.16)$$

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism (teori kapitalisme)*. Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu,

agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Jhinghan, 2004).

e. Endogen

Teori ini beranggapan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil (Thodaro, 2000). Dalam rumusan ini ditekankan adanya kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan modal manusia akan menciptakan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas.

Hasil akhirnya adalah peningkatan skala hasil yang mampu menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Mengingat investasi akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik dan aktif mendorong investasi (Thodaro, 2000).

2.1.6 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Pendapatan Regional

Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di harapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah (Wibowo, 2006). Kebijakan fiskal diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih nyata pada sektor perekonomian, seperti meningkatnya konsumsi, kebutuhan akan jasa perencanaan dan pembangunan, penyerapan buruh dan tenaga kasar.

Menurut Halder (2007), terdapat dua indikator yang biasa digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu rasio pendapatan dan rasio pengeluaran. Selain dua indikator tersebut, Akai dan Sakata (2002) menggunakan Indikator Otonomi yang terdiri atas berbagai kemandirian fiskal, salah satu alasannya adalah suatu daerah mungkin memperoleh dana perimbangan yang kecil dari pemerintah pusat namun pendelegasian fiskal di daerah tersebut akan dipandang cukup tinggi apabila pemerintah daerahnya mampu mendanai pengeluaran dari PAD yang dimilikinya.

Secara tidak langsung ini menyebabkan persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan kepuasan masyarakat. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakatnya, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan efektif untuk dijalankan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Jaka Sriyana (2011) dalam penelitiannya yang terdahulu yang berjudul Disparitas Fiskal antar daerah di provinsi Jawa Timur. Bertujuan untuk mengkaji perbedaan/ disparitas fiskal antardaerah di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2007-2009. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda rata terhadap berbagai kelas/kelompok variabel fiskal daerah, yaitu tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan fiskal. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi bahwa kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah secara terus menerus memiliki kemandirian fiskal yang sangat bervariasi namun cenderung memiliki ketergantungan fiskal yang hampir sama

Sodiq (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Regional Studi kasus Data Panel di Indonesia. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi swasta, pengeluaran pemerintah, angkatan kerja dan keterbukaan perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah variabel investasi

swasta tidak berpengaruh sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Variabel keterbukaan ekonomi memiliki hubungan yang konsisten dengan teori tetapi tidak signifikan. Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa daerah belum bisa menyerap angkatan kerja.

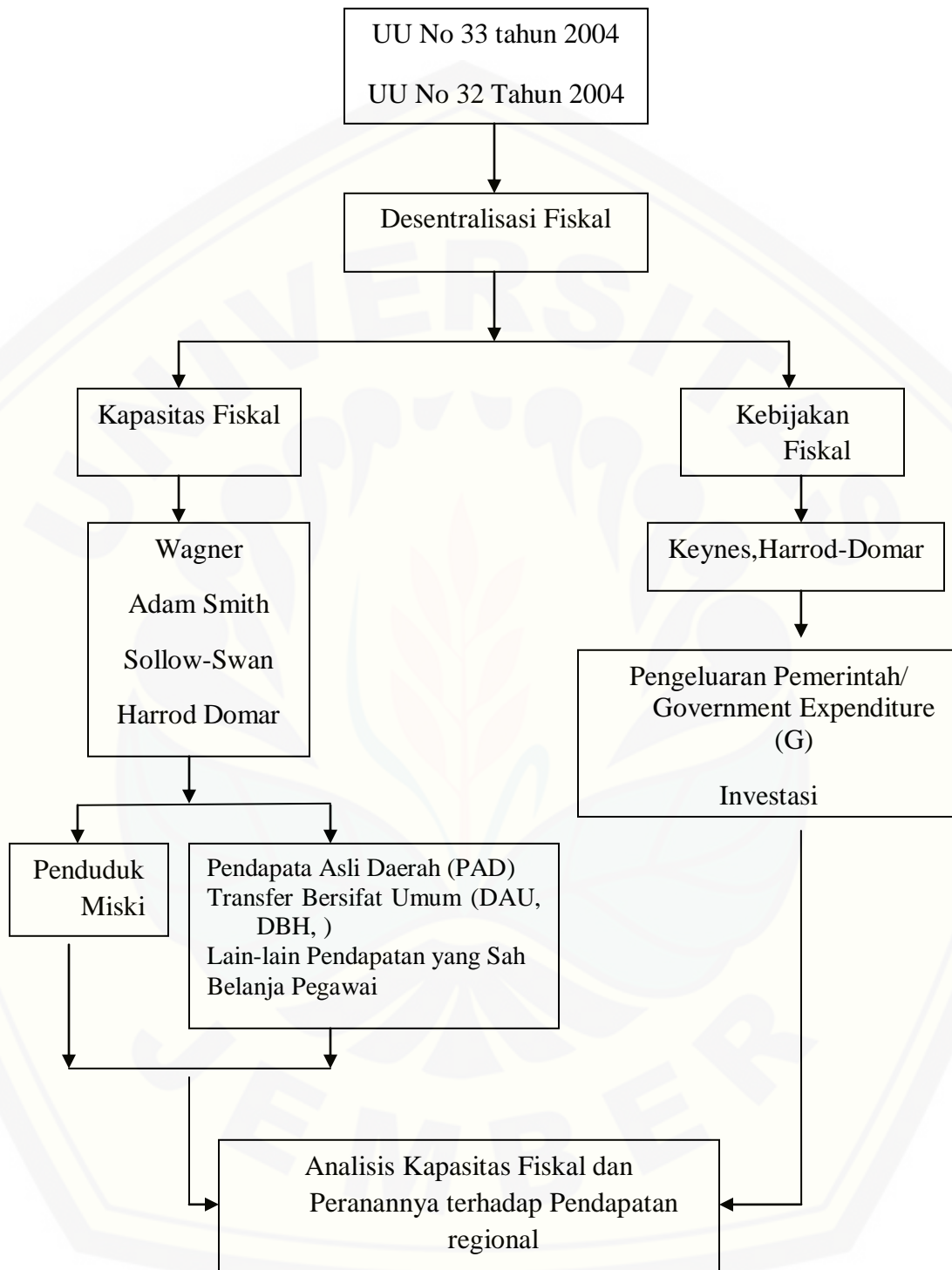
Wibowo (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 29 Provinsi di Indonesia (1999-2004). Bertujuan untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pengeluaran dan pendapatan menunjukkan tanda positif dan signifikan. Indikator otonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi cenderung membaik.

Nama	Judul	Metode Penelitian	Variabel	Temuan
Sriyana (2011)	Disparitas fiskal antar daerah provinsi Jawa Tengah	Kemandirian Fiskal dan Ketregantungan Fiskal	DAU dan Total Belanja Daerah	jadi penurunan tingkat Kemandirian Fiskal. Ketregantungan Fiskal memiliki tingkat disparitas yang rendah
Zani Sodik (2007)	Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia	regresi Data Panel	KB, Investasi Swasta, Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, ekspor-impor	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi swasta tidak berpengaruh sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. - Variabel keterbukaan ekonomi memiliki hubungan yang konsisten dengan teori tetapi tidak signifikan. - Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa daerah belum bisa menyerap angkatan kerja.
Wibowo (2008)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 29 Propinsi di	metode regresi data panel dengan metode fixed effect	KB, Penerimaan dan pengeluaran pemerintah	Secara umum implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pengeluaran dan pendapatan

	Indonesia (1999-2004)			menunjukkan tanda positif dan signifikan. kator otonomi berpengaruh negatif tetapi cenderung membaik.
--	-----------------------	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian sebagai pedoman atau sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus pada tujuan penelitian (Sirait, 2013). Dalam penelitian ini, berlandaskan perubahan tata cara pemerintahan sekaligus pengelolaan keuangan demi kelancaran pertumbuhan daerah. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini kapasitas fiskal adalah gambaran sejauh mana sebuah daerah mengelola keuangannya dengan menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Bersifat Umum (DAU, DBH), Lain-lain pendapatan yang sah, Belanja Pegawai dan penduduk miskin. Sedangkan kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Dengan Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi yang secara nyata dapat menggambarkan efek dari kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan (kusmayadi dan sugiantoro, 2000). Dalam arti hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan. Maka hipotesis untuk penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Timur.

Hipotesis 3 : Diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Timur.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. Penelitian ini menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Wiratha, 2006).

Melalui uji hipotesis yang telah diajukan, diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yang ada dalam hipotesis tersebut, yaitu apakah kebijakan fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah yang diwakilkan oleh pertumbuhan PDRB di Jawa Timur.

3.1.2 Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Pegawai, Penduduk Miskin, Belanja Pemerintah dan Investasi.

3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, untuk mengetahui pengaruh tingkat kapasitas fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur tahun 2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan *cross section*. Dimana data sekunder merupakan data yang diterbitkan oleh orang yang bukan pengolahnya atau data yang diperoleh oleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan catatan historis yang telah tersusun dalam dokumen dan dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik (angka). Sumber utama dalam penelitian ini adalah BPS Propinsi Jawa Timur, Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur, media elektronik dan media cetak.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan kurun waktu 4 tahun yaitu 2010-2013, sehingga jenis data yang digunakan adalah data panel. Data Panel merupakan data gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*) (Gujarati, 2009).

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Menghitung Tingkat Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Bertujuan untuk mengetahui tingkat kapasitas Fiskal yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dalam penelitian ini digunakan persamaan umum yang digunakan pemerintah dan menurut peraturan menteri keuangan No 33/PMK.07/2014 adalah sebagai berikut :

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAU} + \text{LP}) - \text{BP}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

Keterangan PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

LP : Lain-lain Pendapatan yang Sah

BP : Belanja Pegawai

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari 2 atau sama dengan 2 (indeks \geq 2) merupakan Daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sangat tinggi;

- b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara 1 atau sama dengan 1 sampai dengan 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan Daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi;
- c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara 0,5 atau sama dengan 0,5 sampai dengan 1 ($0,5 \leq \text{indeks} < 1$) merupakan Daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sedang;
- d. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari 0,5 ($\text{indeks} < 0,5$) merupakan Daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal rendah.

3.3.2 Analisis Regresi Data Panel Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pendapatan Regional.

Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan regional pada masing-masing Kabupaten/Kota, dibutuhkan koefisien (*slope*) pada masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga model ekonometrika yang digunakan adalah metode regresi panel *fixed effect model* dengan asumsi *intersep* dan *slope* berbeda antar individu (*all coefficients vary across individuals*). Model ekonominya adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003: 640-647).

$$Y = \alpha + \beta_1 G + \beta_2 I + \mu_{it} \quad (3.1)$$

Dari model 3.1 kemudian ditransformasikan ke model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_0 G + \beta_1 I + \mu_{it} \quad (3.2)$$

Dimana:

Y : Pendapatan Regional (PDRB),

G : Government Expenditure (Pengeluaran Pemerintah)

I : Investasi

α_1 : *Intercept*,

β_1, β_2 : *Slope coefficient*,

u_{it} : *Error term*.

3.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu :

- a. Metode *Common Effect* adalah metode yang hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu (Nachrowi, 2006). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar Kabupaten/Kota baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.
- b. Metode *Fixed Effect* adalah metode yang mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV). Ada beberapa asumsi dalam metode ini antara lain: (1) intersep dan *slope* adalah tetap sepanjang waktu dan individu, (2) *slope* adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu, (3) *slope* tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu, (4) *intersep* dan *slope* berbeda antar individu, dan (5) intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.
- c. Metode *Random Effect* adalah metode yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Nachrowi, 2006). Teknik yang digunakan dalam metode *random effect* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar individu. Teknik metode OLS tidak

dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan *Metode Generalized Least Square (GLS)*.

3.3.4 Prosedur Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengelola data panel, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu:

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan guna mengetahui apakah model yang digunakan adalah *Common Constant (OLS)* atau *Fixed Effect Model (FEM)*. Perhitungan F statistik didapat dari Uji *Chow* dengan rumus (Nachrowi, 2006):

$$F = \frac{\frac{SSE_1 - SSE_2}{(n - 1)}}{\frac{SSE_2}{(nt - n - k)}}$$

Keterangan:

SSE1 = Sum *Square Error* dari model *Common Effect*,

SSE2 = Sum *Square Error* dari model *Fixed Effect*,

n = Jumlah perusahaan (*cross section*),

nt = Jumlah *cross section* x jumlah *time series*,

k = Jumlah variabel independen.

Pengujian ini mengikuti distribusi F statistik dimana jika nilai F statistik yang didapat lebih besar daripada nilai F tabel maka H_0 ditolak dengan hipotesis:

H_0 : OLS lebih baik daripada FEM,

H_1 : FEM lebih baik daripada OLS.

b. Uji Hausman

Uji ini dilakukan guna mengetahui melihat apakah ada atau tidaknya efek random di dalam panel data. Pengujian ini mengikuti distribusi chi-square pada derajat bebas (k-1) dengan hipotesis:

H_0 : REM lebih baik daripada FEM,

H_1 : FEM lebih baik daripada REM.

Uji Hausman akan mengikuti distribusi *chi-squares* sebagai berikut:

$$m = \hat{q} \text{ Var } (\hat{q}) - 1\hat{q}$$

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

3.3.5 Uji Statistik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pada masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara parsial maupun secara bersama terhadap variabel terikat, antara lain:

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

2. Uji F-statistik

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung $>$ dari F tabel, (H_0 ditolak H_a diterima) maka variabel independennya secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya, sebaliknya jika F hitung $<$ F tabel, maka variabel independennya secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3. Uji t-statistik

Menurut Imam Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

1. Jika nilai signifikan $>$ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $>$ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.3.6 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel mempunyai distribusi data yang normal maupun mendekati normal atau tidak. Pengujian didasari dari data dengan mean dan standart deviasi

yang sama. Uji normalitas digunakan jika sampel kurang dari 30, karena jika sampel lebih dari 30 maka error term akan terdistribusi dengan normal (Gujarati, 2009).

Untuk menguji normalitas data dalam penelitian menggunakan *Jarque Bera Test*. Uji *Jarque Bera* didistribusi dengan X^2 dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar 2, dimana X^2 -hitung $< X^2$ -tabel menunjukkan data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini berguna untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang sempurna atau hamper sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas. Multikolinieritas dalam model dapat dilihat dari nilai t dan F dalam model. Apabila nilai F berpengaruh signifikan tetapi nilai t tidak signifikan maka dapat diduga terjadi multikolinieritas. Perbaikan dalam pelanggaran ini dapat diatasi dengan pemberian perlakuan *crosssection weight*.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. (Ghozali, 2006:99-100) Untuk menguji ada gejala autokorelasi dalam model regresi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW).

Tabel 3.1 Nilai Durbin Watson dalam Eviews

Nilai DW	Hasil
$DW < dl$	Tolak H_0 , Korelasi serial positif
$dl < DW < du$	Hasil tidak dapat ditemukan
$du < DW < 4-dl$	Terima H_0 tidak ada korelasi positif atau negatif
$4-du < DW < 4-dl$	Hasil tidak dapat ditentukan

DW < 4-dl	Tolak H ₀ korelasi serial negatif
-----------	--

Sumber : Nachrowi,2006

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006:125).

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji statistik yaitu uji *glejser* sehingga lebih menjamin keakuratan hasil. Uji *gletser* dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

1. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu probabilitas signifikansinya < 0,05, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu probabilitas signifikansinya > 0,05, maka tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Definisi Variabel Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan gambaran total output barang dan jasa dari fungsi input unit-unit produksi yang digunakan pada suatu daerah dalam periode tertentu. Menyandingkan PDRB antar daerah pada rentang periode tertentu akan didapatkan informasi mengenai perbedaan laju pendapatan ekonomi antar daerah.